



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA
DAN OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang ke-	: III
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI 2. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Bappenas RI 3. Ditjen Anggaran Kemenkeu RI
Hari/Tanggal	: 10 Februari 2022
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
Agenda acara	: Pandangan dan Tanggapan terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 28 orang Anggota Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng – Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI 2. Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. – Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI 3. Putut Hari Satyaka, S.E., MPP – Direktur Anggaran Bidang PMK Kementerian Keuangan RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja MBKM Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan

pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber: Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng – Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI; Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. – Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI; dan Putut Hari Satyaka, S.E., MPP – Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan RI dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja MBKM Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A.Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Plt. Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, yang telah menyampaikan paparan informasi dan masukan mengenai Pandangan dan Tanggapan terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Plt. Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI
 - a. Mendukung kebijakan dan program MBKM, mengingat program ini selaras dengan salah satu target RPJMN yaitu terkait kebecerjaan lulusan pendidikan tinggi.
 - b. Kemendikbudristek RI agar memastikan adanya evaluasi yang terukur terhadap implementasi MBKM sehingga dapat diterjemahkan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran termasuk rincian output dan turunannya serta indikator dan informasi kinerja terkait.
 - c. Kemendikbudristek RI agar memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan MBKM dapat berkontribusi dalam mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, salah satunya adalah sasaran RPJMN 2020-2024 terkait persentase lulusan pendidikan tinggi yang mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan.
2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
 - a. Mendukung kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, terutama program yang berdampak langsung kepada mahasiswa dan pengembangan dosen di PTN maupun PTS.
 - b. Total dukungan anggaran terkait Program MBKM tahun 2021 sebesar Rp. 1,88 triliun, yang dialokasikan melalui LPDP sebesar Rp. 1,594 miliar dan Kemendikbudristek sebesar Rp. 290,4 miliar.
 - c. Total dukungan anggaran program MBKM tahun 2022 sebesar Rp.1,913 miliar, yang dialokasikan melalui LPDP sebesar Rp. 1,254 miliar dan Kemendikbudristek sebesar Rp. 659 miliar.

- d. Untuk mendukung pengembangan kompetensi tenaga pendidik/dosen di PTS, dilaksanakan melalui program kompetisi kampus merdeka/*competitive fund* dan *matching fund* serta memberikan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar Perguruan Tinggi Swasta.
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI
 - a. Program MBKM merupakan salah satu program untuk mewujudkan peran penting perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang kreatif dan produktif (*creative & competitive human capital*) serta sebagai tulang punggung inovasi (*innovation-driven economy*).
 - b. Program kompetisi kampus merdeka/*competitive fund* dan *matching fund* merupakan salah satu skema pembiayaan yang mendukung kegiatan MBKM. Realisasi pemanfaatan *matching fund* oleh Perguruan Tinggi Swasta sampai saat ini sudah terserap sebesar 74,9 miliar.
 - c. Dana melalui LPDP digunakan untuk membiayai lebih dari 50.000 mahasiswa yang mengikuti program MKBM terutama untuk kegiatan Magang dan Kampus Mengajar yang menjadi program yang paling tinggi peminatnya.
 - d. Perguruan Tinggi sudah menyelenggarakan MBKM diikuti lebih dari 250.000 mahasiswa.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait yang mengampu kebijakan pendanaan, sehingga pola pendanaan pendidikan dapat diakselerasikan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang menjadi kewenangan Kemendikbudristek RI, utamanya mengenai pembenahan alokasi dan penggunaan 20% anggaran pendidikan.
 2. Mendorong Kemendikbudristek RI meningkatkan cara dan intensitas sosialisasi program MBKM, mengingat perguruan tinggi dan mahasiswa masih belum memahami konsep MBKM dan mekanisme pelaksanaannya, antara lain mengenai konversi SKS, penyesuaian kurikulum, *matching fund*, pembebanan biaya program, penegasan MBKM merupakan program pilihan, serta memberikan perhatian serius terhadap Perguruan Tinggi yang berada di daerah dan daerah 3T.
 3. Mendorong Kemendikbudristek RI melakukan sinergi program MBKM yang beririsan dengan program K/L lain yang memiliki kesamaan capaian sesuai RPJMN.
 4. Mendorong Kemendikbudristek RI memastikan pelaksanaan MBKM pada K/L atau instansi lainnya, agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung, sehingga efektifitasnya terjaga.
 5. Untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan inovasi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI menambah alokasi anggaran penelitian


dan memberikan kesempatan lebih banyak bagi mahasiswa atau sarjana untuk melakukan penelitian.

6. Mendorong Kemendikbudristek RI membuat kesepakatan dengan Kemenkeu RI terkait penggunaan pembiayaan pendidikan melalui LPDP, terutama bagi pengembangan pendidikan tinggi.
 7. Mendorong Kemendikbudristek RI memastikan proses pelaksanaan program pendidikan yang dibiayai oleh LPDP harus melalui rekomendasi dari Kemendikbudristek RI.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.